

TUGASAKHIR
ANALISIS SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA
KEBIJAKAN
KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA



DISUSUN OLEH:

BRUNO ALVERDI YANTOKIA

17001326

AKDEMIK MANAJEMEN ADMINISTRASI YPK

YOGYAKARTA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : Analisis Sistem Pengambilan Keputusan Pada Kebijakan
Ketahanan pangan di Yogyakarta

Nama : Bruno Alverdi Yantokia

Program Studi : Akademi Manajemen Administrasi Perkantoran

Akir program studi Manajemen Administrasi AMA YPK Yogyakarta pada:

Hari : Senin

Tanggal : 3, Agustus 2020

Mengetahui
Dosen pembimbing

Sarjita, S.E.,M.M.
NIK. 11300114

HALAMAN PERSEMBAHAN

Laporan tugas akhir ini telah diajukan pada Akademi Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta untuk memenuhi persyaratan akhir pendidikan pdsprogram studi Manajemen Administrasi.

Disetujui dan disahkan pada:

Hari : sabtu

Tanggal : 15 agustus 2020

Tim penguji

Penguji 1

Penguji 2

Endang Hariningsih, S.E.,M.Sc.
NIK.10600105

Wahyu Eko Prasetyanto, S.H.,M.M.
NIK.11400117

Mengetahui
Direktur

Aning Pramudyo, S.E.,M.M.
NIP19780204 200501 1 002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawa ini adalah:

Nama : Bruno Alverdi Yantokia

NIM :17001326

Judul tugas akhir : analisis sistem pengambilan keputusan pada kebijakan ketahanan pangan di yogyakarta.

Dengn ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini hasil karya sendiri dan belum pernah diterbitkan oleh pihak manapun kecuali tersebut dalam refrensi dan bukaan merupakan hasil karya orang lain sebagian maupun secara keseluruhan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ada yang mengklaim bahwa karya ini milik orang lain dan dibenarkan secara hukum, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum

Yogyakarta juni 2020

Yang membuat pernyataan

Bruno Alverdi Yntokia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang maha esa, yang telah melimpahkan rahmat,dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (TA) ini yang berjudul ANALISIS SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA.

Tugas akir ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) di AMA YPK Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Anung Pramudyo, S.E.,M.M selaku Direktur AMA YPK Yogyakarta
2. Bapak Sarjita,.SE, MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akir.
3. Segenap Dosen Program Studi Pendidikan Administrasi Akademi Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta.
4. Orang tua serta keluarga yang memeberikan dorongan dan bantuan dan materil, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akir ini dengan baik.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh kerena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Namun dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, penulis tetap berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Yogyakarta, 2020

Penyusun

Bruno alverdi yantokia

MOTO

Bersyukurlah dalam pengharapan ,sabarlah dalam

Kesesakan dan bertekunlah dalam doa

(Roma 12:12)

Aku menanam Apolos menyiram

Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan

(1 Korentus 3:6)

Yang memperbaiki engkau, engkau sendiri dan yang

Memburukkan engkau, engkau sendiri

HALAMAN PERSEMBAHAN

Laporan TA penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan keselamatan, kekuatan dan kesehatan serta berkat yang melimpah sehingga saya bisa melewati tahap ini dalam studi saya.
2. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan Doa dan dukungan yang tulus kepada saya.
3. Kaka dan Adik tersayang Artus, dan Virgi yang selalu memberi motivasi dan doa kalian yang tulus.
4. Teman-teman yang selalu memberi dukungan dan Doa kalian semua.
5. Sahabat terbaik Polan, Yesaya, Dirgan, Hosama, Supar, Sisko Indah Raisa Adik Laura.
6. Teman-teman Relawan Grigak yang selalu memberi support.
7. Kampus tercinta AMA YPK Yokyakarta, jurusan Manajemen Administrasi Perkantoran, sebagai wadah kami memperoleh ilmu
8. Adik since yang selalu memberi suport dan bantuan.
9. Serta seluruh keluarga, sahabat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAAN.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belkang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfat penelitian	6
BAB II LANDASAN MATERI	
A. Sistem	8

B. Pengambilan keputusan	12
C. Ketahanan pangan	16

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian	20
B. Lokasi penelitian	20
C. Jenis data	20
D. Teknik pengambilan data.....	21

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian	23
B. Pembahasan	36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46

DAFTAR TABEL

A. Daftar tabel 2.1 Sarana dan Prasarana/Fasilitas	33
B. Daftar tabel 2.2 Luas Bangunan Dinas Pertanian dan Petahanan Pangan DIY	34
C. Daftar tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .	34
D. Daftar tabel 2.4 Berdasarkan Golongan	35
E. Daftar tabel 2.5 Berdasarkan Jabatan	35

DAFTAR GAMBAR

A. STRUKTUR ORGANISASI	26
------------------------------	----

ABSTRAK

Bruno Alverdi Yantokia, 17001326. Analisis Sistem Pengambilan Keputusan Pada Kebijakan Ketahanan Pangan di Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan dan perumusan kebijakan ketahanan pangan di Yogyakarta dan mengetahui pengaruh sistem pengambilan keputusan pada kebijakan ketahanan pangan di Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan di Yogyakarta dari bulan 17 februari 2020 sampai pada bulan 27 maret 2020. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode survei dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan metode analisis Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan model analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ketahanan pangan di Yogyakarta pada saat ini masih bergantung pada program nasional ketahanan pangan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa program peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Yogyakarta mengacu pada program ketahanan pangan nasional yang terdiri dari (1) Pengembangan dan pendampingan desa mandiri pangan, (2) Pengembangan lumbung pangan desa.

Kata Kunci :Ketahanan Pangan, Perumusan Kebijakan, Yogyakarta, Path Analysis.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan kebudayaan yang pertama kali dikembangkan manusia sebagai respon terhadap tantangan kelangsungan hidup yang berangsur menjadi sukar karena semakin menipisnya sumber pangan di alam bebas akibat laju pertumbuhan manusia (Nurmala Dkk, 2012 : 19).

Pertanian adalah sejenis proses produksi khusus yang didasarkan atas proses pertumbuhan dan hewan (Satari, 1999) dalam (Nurmala Dkk, 2012 : 19) Sektor pertanian di negara-negara berkembang (*development country*) peranannya sangat besar sekali karena merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya. Peranan sektor pertanian dalam perekonomian dalam suatu negara dapat dilihat dari besarnya presentase Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor pertanian negara tersebut. Makin besar kontribusi sektor pertanian terhadap PDB-nya berarti negara tersebut masih tergolong atau termasuk negara agraris , sebaliknya apabila kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, sebaliknya apabila kontribusi sektor pertanian terhadap PDB persentasenya kecil maka negara tersebut disebut negara industri.

Kontribusi sektor pertanian dinegara kita dari tahun ke tahun persentasenya terus menurun searah dengan melajunya perkembangan sektor industri yang terus meningkat. Sebelum tahun tujuh puluhan, persentase PDB dari sektor pertanian masih diatas 50%, pada tahun 1993 menjadi 17,88% dan pada tahun 1995 hanya mencapai 17.10%, sejak krisis ekonomi melanda

Indonesia pada tahun 1997 kontribusi sektor pertanian terhadap PDB cenderung meningkat khususnya ekspor non migas (Nurmala Dkk, 2012 : 95).

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu pemenuhan atas pangan yang cukup, bergizi dan aman merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara optimal. Pembangunan ketahanan pangan diselenggarakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata didasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Proses pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan secara bertahap, melalui proses pemberdayaan masyarakat. Salah satu syarat utama dalam pemberdayaan masyarakat, harus dikenali dan dimengerti terlebih dahulu potensinya, sehingga dapat dicarikan peluang dan alternatif, agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal agar tingkat ketahanan pangannya dapat ditingkatkan (Husaini, 2012 : 1) Peranan sektor pertanian di Indonesia sangat penting dilihat dari keharusannya memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang pada tahun 2005 berjumlah 219,3 juta, dan diprediksikan terus bertambah sebesar 1,25% (Nainggolan, 2006 : 78) dalam (Purwaningsih, 2008 : 1).

Pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu : menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk

meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan dalam kebutuhan dasar penduduknya akan menjadi sangat tergantung pada Negara lain dan itu berarti menjadi Negara yang tidak berdaulat (Arifin,2004) dalam (Purwaningsih, 2008 : 1).

Ketahanan pangan harus mencakup faktor ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Faktor ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, baik dari segi kualitas, keragaman dan keamanannya. Distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar masyarakat dapat memperoleh pangan dalam jumlah, kualitas dan keberlanjutan yang cukup dengan harga yang terjangkau. Sedangkan faktor konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya (Prabowo, 2010 : 2).

Namun perkembangan kebijakan ketahanan pangan Indonesia saat ini tidak lebih baik dari kebijakan ketahanan pangan pada masa orde baru. Hal ini terlihat dari tercapainya swasembada pangan pada masa tersebut, berbanding terbalik dengan keadaan sekarang, dimana untuk menjaga ketahanan pangan nasional pemerintah mengeluarkan kebijakan impor pangan, dimana hal ini membawa konsekuensi semakin bergantungnya kita pada kebijakan tersebut.

Produksi pangan tergantung pada faktor seperti iklim, jenis tanah, curah hujan, irigasi dan komponen produksi pertanian yang digunakan bahkan insentif bagi para petani untuk menghasilkan pangan. Pangan menjadi tolak ukur ketersediaan pangan yang meliputi produk serealia, kacang-kacangan,

minyak nabati, sayur- sayuran, buah-buahan, rempah, gula, dan produk hewani. Karena porsi utama dari kebutuhan kalori harian berasal dari sumber pangan karbohidrat, maka digunakan analisa kecukupan pangan adalah karbohidrat yang bersumber dari produksi pangan serelia, yaitu padi, jagung, dan ubi-ubian (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Yogyakarta).

Pemerintah provinsi Yogyakarta melalui program agropolitan menetapkan komoditi padi sebagai komoditi andalan yang diharapkan dapat menjawab tantangan peningkatan ketersediaan pangan berkelanjutan dengan menerapkan aplikasi teknologi perluasan areal tanam dan peningkatan nilai produksi persatuan hektar lahan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Yogyakarta).

Produksi padi Provinsi Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2016 sampai pada tahun 2029. Peningkatan jumlah produksi ini terutama disebabkan oleh peningkatan luas panen dan produktivitas. Seiring dengan meningkatnya luas area tanamMelihat, Produksi padi rata-rata di tingkat kabupaten cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2016.

Produktivitas di provinsi Yogyakarta terbilang sedikit sekali dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah, sehingga untuk itu provinsi Yogyakarta tergolong kabupaten rawan pangan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan ketahanan pangan nasional, sehingga setiap kali mengeluarkan kebijakan tentang ketahanan pangan terdapat beberapa kendala yang menghadang

misalnya masalah produksi, harga, distribusi, kemudahan kredit, penyelundupan, serta penyelewengan dari oknum-oknum terkait.

Bertolak dari program ketahanan pangan nasional, aspek ketersediaan pangan tergantung pada sumberdaya alam, fisik, dan manusia, sehingga dibutuhkan sistem pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan dikeluarkan. Masalah sistem pengambilan keputusan terletak dari peraturan tentang bagaimann tujuan yang hendak dicapai itu terwujud, dengan melalui dukungan informasi dan data yang diperoleh secara akurat, sehingga pemerintah, dalam hal ini dituntut mampu menguasai sistem pengambilan keputusan yang akan digunakan dalam mengeluarkan kebijakan ketahanan pangan.

Namun tidak semua kebijakan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari skala prioritas dan ketersediaan sumberdaya dari kebijakan tersebut, sehingga menjadi permasalahanya yaitu analisis sistem pengambilan keputusan pada kebijakan ketahanan pangan di Yogyakarta. Atas dasar itu, maka peneliti tertarik untuk meneliti analisis sistem pengambilan keputusan pada kebijakan ketahanan pangan di Yogyakarta.

Kaitan antara Manajemen dengan ANALISIS SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA KEBIJAKAN KETAHANANPANGAN.

Fungsi manajemenadalah berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan dari ketahanan pangan. Sehingga peran dan fungsi manajemen sangat penting untuk kemajuan ketahanan pangan di Yogyakarta..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana program kebijakan ketahanan pangan diYogyakarta?
2. Indikator apa yang berpengaruh pada ketahanan pangan dan perumusan kebijakan

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui program ketahanan pangan di Yogyakarta.
2. Mengetahui indikator apa yang berpengaruh pada ketahanan pangan dan perumusan kebijakan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Meningkatkan kerjasama dalam sebuah organisasi.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengalaman agar tidak kaku apabila sewaktu-waktu kita bekerja di lapangan.
 - c. Mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki guna mencapai efisiensi dan efektifitas pekerjaan para pegawai.
 - d. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang dunia kerja yang sesungguhnya serta karakteristik pelayanan di perkantoran
 - e. Lebih mengetahui dunia kerja dan prosedur pelayanan di perkantoran.
2. Bagi instansi (obyek penelitian).
 - a. Sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan.

3. Bagi Akademi Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu manajemen administrasi, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya dan mempererat kerjasama antara akademik dengan perusahaan atau instansi

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem

1. Pengertian Sistem

Sedemikian rumitnya arus dan jalur hubungan informasi di dalam organisasi, sehingga diperlukan jaminan prosedur dan metode kerja yang secara jelas antara unit informasi satu dengan unit informasi lainnya.

Disamping itu setiap unit juga menghasilkan berbagai macam informasi yang diperlukan oleh unit itu sendiri dan perlu didistribusikan ke unit-unit lainnya dalam organisasi yang sama, karena unit-unit tersebut juga memerlukan informasi dari unit lainnya. Setiap unit berkerja bersama-sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi. Kerjasama organisasi dapat dilakukan sebagai kerjasama mengelola informasi dalam satu atap atau satu lokasi kantor yang sama.

Semua itu merupakan proses yang berkaitan satu dengan yang lainnya menuju kearah sasaran, maksud atau tujuan tertentu. Prosedur itu merupakan komponen dari suatu sistem. Dari uraian di atas dapat menyebutkan beberapa pengertian sistem.

Menurut Syamsi (1994) mendefinisikan sistem sebagai berikut :
Sistem adalah suatu rangkaian prosedur yang telah merupakan suatu kebetulan untuk melaksanakan suatu fungsi.

Sistem adalah gabungan dari elemen-elemen yang saling dihubungkan oleh suatu peroses atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan

organisasi dalam upaya menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan. Sistem adalah suatu struktur konseptual yang terdiri dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai satu unit organik untuk mencapai keluaran yang diinginkan secara efektif dan efisien (Ryans 1994).

Dari pengertian sistem di atas, pengertian sistem secara umum dapat dibedakan atas dua macam yakni:

a. Sistem Sebagai Suatu Wujud

Suatu sistem disebut sebagai suatu wujud (*entity*), apabila bagian-bagian atau elemen-elemen yang terhimpun dalam sistem tersebut membentuk suatu wujud yang ciri-cirinya dapat dideskripsikan dengan jelas. Tergantung dari sifat bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk sistem maka sistem sebagai wujud dapat dibedakan atas dua macam:

1) Sistem sebagai suatu wujud yang konkrit

Pada bentuk ini sifat dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk sistem adalah konkrit dalam arti dapat ditangkap dengan panca indra. Contohnya adalah suatu mesin yang bagian-bagian atau elemen-elemennya adalah berbagai unsur suku cadang.

2) Sistem sebagai suatu wujud yang abstrak

Pada bentuk ini, bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk sistem adalah abstrak dalam arti dapat ditangkap oleh panca indra. Contohnya adalah sistem kebudayaan yang bagian-

bagian atau elemen-elemen pembentuknya adalah berbagai unsur budaya.

b. Sistem Sebagai Suatu Metoda

Suatu sistem disebut sebagai suatu metoda (*method*), apabila bagian-bagian atau elemen-elemen yang terhimpun dalam sistem tersebut membentuk suatu metoda yang dapat di pakai sebagai alat dalam melakukan pekerjaan administrasi. Contohnya adalah sistem pengawasan yang bagian-bagian atau elemen-elemen pembentuknya adalah berbagai peraturan. Pemahaman sistem sebagai metoda berperan besar dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu sistem. Populer dengan sebutan pendekatan sistem (*system aproach*) yang akhir-akhir ini banyak dimanfaatkan pada pekerjaan administrasi.

Dalam setiap sistem selalu terdapat sub sistem yang merupakan bagian yang lebih kecil dari sistem. Contoh sistem misalnya *Planning, Programming, Budgeting System* (PPBS). Sistemnya adalah PPBS itu sendiri sedangkan subsistemnya adalah subsistem *planning*, subsistem *programming*, susbsistem *budgeting*, dimana subsistem-subsistem tersebut saling berkaitan, berkesinambungan atau saling berinteraksi.

2. Ciri Sistem

Sesuatu disebut sebagai sistem apabila ia memiliki beberapa ciri pokok sistem, anatara lain:

a. Ciri sistem menurut Elias M. Awad (1979)

- 1) Sistem bukanlah sesuatu yang berada diruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkungan.
 - 2) Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri, yang antara lain juga di sebabkan karena di dalam sistem terdapat unsur umpan balik (*feed back*).
 - 3) Sistem terbentuk dari 2 atau lebih subsistem, dan setiap subsistem terdiri dari 2 atau lebih subsistem lain yang lebih kecil, demikian seterusnya.
 - 4) Antara satu subsistem dengan subsistem lainnya terdapat hubungan yang saling tergantung dan mempengaruhi. Keluaran suatu subsistem misalnya, menjadi masukan bagi subsistem lain yang terdapat dalam sistem.
 - 5) Sistem mempunyai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Pada dasarnya tercapinya tujuan atau sasaran ini adalah sebagai hasil kerjasama dari berbagai subsistem yang terdapat dalam sistem.
- b. Ciri sistem menurut A Shode & Dan Voich Jr (1974)
- 1) Sistem mempunyai tujuan karena itu semua perilaku yang ada pada sistem pada dasarnya bermaksud mencapai tujuan tersebut (*purposive behavior*)
 - 2) Sistem sekalipun terdiri dari berbagai bagian atau elemen-elemen tetapi secara keseluruhan merupakan suatu yang bulat dan utuh (*wholism*) jauh melebihi kumpulan bagian atau elemen-elemen tersebut

- 3) Berbagai bagian atau elemen-elemen yang terdapat dalam sistem saling terkait, berhubungan serta berinteraksi
- 4) Sistem bersifat terbuka dan selalu berinteraksi dengan sistem lain yang lebih luas, yang biasanya disebut dengan lingkungan
- 5) Sistem mempunyai kemampuan transformasi, artinya mampu mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Dengan perkataan lain sistem mampu mengubah masukan menjadi keluaran
- 6) Sistem mempunyai mekanisme pengendalian, baik dalam rangka menyatukan berbagai bagian atau elemen-elemen atau dalam rangka megubah masukan menjadi keluaran.

B. Pengambilan Keputusan.

Pengambilan keputusan adalah ilmu, karena aktivitas tersebut memiliki sejumlah cara, metode atau pendekatan tertentu yagn bersifat sistematis, teratur dan terarah. Pendekatan atau langkah-langkah pengambilan keputusan dikatakan sistematis kerena terdapatnya sejumlah langka A-Z yang jelas dalam menjawab masalah. Kejelasan langkah tersebut menjadikan pengambilan keputusan bersifat teratur dan terarah, yang berarti aktifitas tersebut selalu diarahkan untuk menghasilkan solusi serta tindakan yang tegas bagi pencapaian tujuan (Dermawan 2012 :2).

Ilmu pengambilan keputusan didasarkan atas penerapan gaya pemikiran yang dianut oleh seseorang dan persepsinya atas lingkungan dan masalah. Paradigma pengambilan keputusan yang dianut pada saat ini adalah pengambilan keputusan merupakan ilmu yang menerapkan sejumlah

pendekatan penelitian ilmiah (scientific research approach) dalam bentuk teknik-teknik pengambilan keputusan atas dasar perhitungan sistematis atau statistik (Dermawan, 2013: 2).

Pengambilan keputusan merupakan ilmu dan seni yang harus dicari, dipelajari, dimiliki dan dikembangkan secara mendalam oleh setiap orang. Bila manusia gagal menguasai bidang tersebut, maka muncullah beragam masalah. Masalah yang muncul dalam pencapaian tujuan dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan kita dalam melakukan pengambilan keputusan, dalam menentukan pilihan yang tepat. Pengambilan keputusan disebut sebagai seni karena kegiatan tersebut selalu dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang memiliki karakteristik keunikan tersendiri (Dermawan, 2013:2-3)

Menurut Dermawan (2013 : 8) dalam pengambilan keputusan terdapat tipe- tipe dalam pengambilan keputusan, antara lain yaitu :

1. Tipe keputusan terprogram dan tidak terprogram Keputusan terprogram atau terstruktur merupakan keputusan bersifat rutin, menjadi berulang-ulang. Karakteristik dari keputusan ini sangat akrual, karena keputusan sejenis ini merupakan perwujudan kumulatif dari langkah-langkah penyelesaian masalah yang terjadi secara berulang.

Keputusan tidak terprogram merupakan kategori keputusan yang berkaitan erat dengan kondisi lingkungan kegiatan bisnis yang tidak pasti dan sangat dinamis. Pengambilan keputusan selalu dihadapkan pada sejumlah masalah baru yang sulit diramalkan

2. Tipe keputusan atas dorongan pencapaian dan tarikan lingkungan
Pengambilan keputusan atas dasar cara pandang ini berangkat dari terdapatnya sesuatu yang harus diselesaikan dan terdapatnya masalah yang harus dipecahkan. Sesuatu yang harus diselesaikan dengan mengisyaratkan keberadaan karakteristik : rutinitas, maupun tidak. Sedangkan masalah yang harus diselesaikan menandakan bahwa keputusan muncul seolah “ditarik” oleh kekuatan lingkungan.

Pengambilan keputusan merupakan sebuah kajian yang rumit, dan terus berkembang. Maka sejumlah teknik yang diperkenalkan merupakan teknik yang relatif sederhana, mudah dipahami dan mudah diakses dalam kehidupan keseharian (Dermawan, 2013 :171)

Menurut Dermawan (2013 : 171) terdapat beberapa teknik dalam pengambilan keputusan, antara lain yaitu :

1. Analisis Diagram Pareto (Pareto Analysis) Analisis pareto merupakan sebuah teknik pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menemukan perubahan yang akan memberikan manfaat terbesar bagi pengambilan keputusan. Teknik ini berguna dalam kondisi terdapatnya kondisi sejumlah alternatif solusi dan tindakan yang memungkinkan dapat dipilih
2. Analisis Perbandingan Sepasang (Paired Comparison Analysis) Teknik ini memudahkan proses pemilihan masalah yang paling penting untuk diselesaikan, atau memilih alternatif solusi yang paling akan mendatangkan manfaat besar.

3. Analisis Jaringan (Grid Analysis) Teknik pengambilan keputusan ini merupakan teknik yang berguna menentukan pilihan atas satu alternatif solusi. Dimana penggunaan yang paling efektif adalah bila kita dihadapkan pada sejumlah alternatif solusi yang menarik, serta terdapatnya beragam faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
4. Teknik Implikasi Plus-Minus (Plus-Minus Implication, PMI) Teknik pengambilan keputusan PMI menimbang implikasi plus dan minus dari suatu pilihan, solusi atau tindakan. Teknik ini digunakan untuk melihat konsekuensi plus-minus atau pro-kontra dari suatu keputusan yang akan diambil.
5. Analisis Kekuatan Lapangan (Force Field Analysis) Teknik ini dipakai untuk melihat seluruh kekuatan yang mendukung dan menghambat sebuah keputusan. Teknik ini dapat dikatakan sebagai metode khusus menimbang pandangan pro dan kontra atas sebuah pilihan
6. Analisis Biaya dan Manfaat (Cost/Benefit Analysis) Teknik analisis biaya dan manfaat merupakan teknik yang digunakan untuk memutuskan kemungkinan membuat perubahan atas alternatif pilihan yang telah dipertimbangkan. Analisis biaya dan manfaat pada umumnya dilakukan dengan menerapkan teknik analisis keuangan. Seluruh biaya dan manfaat dikonversi menjadi uang sebagai denominator utama.

C. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu hal yang utama dalam pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat, upaya pencapaian ketahanan pangan yang telah menjadi perhatian pada lingkup nasional dan internasional. Kerentanan atas pangan dapat mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat, baik pada aspek fisik, kesehatan, sosial maupun ekonom (prihatin Dkk, 2012 : 2) Jika konsumsi pangan tidak tercukupi, khususnya pangan karbohidrat yang merupakan sumber energi maka akan rentan terjadi rawan pangan yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup manusia

Kerawanan pangan merupakan salah satu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat, suatu daerah dikatakan rawan pangan dapat diukur dengan banyaknya jumlah rumah tangga prasejahtera yang relatif masih banyak karena alasan ekonomi, status gizi masyarakatnya yang ditunjukkan oleh status gizi balitanya, ketersediaan pangan daerah dan kerentanan pangan.

Oleh Karena itu peningkatan ketahanan pangan tentunya menjadi motor penggerak yang akan memperkuat fokus-fokus pembangunan, terutama fokus pengentasan kemiskinan dan peningkatan luas sumber daya manusia. Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH), kecukupan energi yang diperoleh dari pangan karbohidrat adalah 50% untuk kelompok serelia dan 6% untuk kelompok umbi-umbian. Hal tersebut menunjukkan posisi penting pangan sumber karbohidrat dan kecukupan energi penduduk. Selain itu, berdasarkan

Susenas 2005, 43,61% kecukupan protein penduduk Indonesia berasal dari beras. Karena itu, ketidakcukupan pangan sumber karbohidrat bisa menjadi peringatan kewaspadaan pangan paling dini (Apriani dan Baliwati, 2011 :1)

Dimensi ketahanan pangan nasional mencakup aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi, serta keamanan pangan. Pada aspek ketersediaan pangan termasuk elemen : produksi domestik, impor, ekspor, cadangan dan transfer pangan dari pihak atau Negara lain. Adanya elemen ekspor-impor pada aspek ketersediaan pangan menunjukkan bahwa kinerja ketahanan pangan nasional tidak terlepas dari dinamika peran perdagangan internasional, khususnya perdagangan komoditas pangan. Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan dapat pula terwujud apabila secara umum telah terpenuhi dua aspek sekaligus. Pertama adalah tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari.

Pembangunan ketahanan pangan adalah terwujudnya kemandirian pangan yang cukup dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk melalui proses produksi dalam negeri. Ketersediaan pangan (disuatu daerah dan suatu saat tertentu) dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu produksi dalam negeri, impor pangan, dan cadangan pangan. Ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan diupayakan melalui produksi dalam negeri termasuk cadangan pangan. Impor pangan merupakan pilihan terakhir jika kelangkaan produksi pangan (Lantarsih Dkk, 2011:3)

Menurut Dewan Ketahanan Pangan (2006 : 2), pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat mikro/tingkat rumah tangga dan individu serta tingkat makro/nasional sebagai berikut :

1. Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilo kalori/hari, dan penyedia protein per kapita minimal 57.
2. Meningkatkan konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilo kalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari
3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) minimal 80 (padi-padian 275g, umbi-umbian 100g, pangan hewani 150g, kacang-kacangan 35g sayur dan buah 250g)
4. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat
5. Mengurangi jumlah atau persentase penduduk rawan pangan kronis (yang mengonsumsi kurang dari 80% AKG) dan penduduk miskin

minimal 1% pertahun ; termasuk di dalamnya ibu hamil yang mengalami anemia gizi dan balita dengan gizi kurang

6. Meningkatkan kemandirian pangan melalui pencapaian swasembada beras berkelanjutan, swasembada jagung pada tahun 2007 , swasembada kedelai pada tahun 2015, swasembada gula pada tahun 2009 dan swasembada daging sapi pada tahun 2010 ; serta membatasi impor pangan utama di bawah 10% dari kebutuhan pangan nasional
7. Meningkatkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat
8. Meningkatkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan pusat.
9. Meningkatnya jangkauan jaringan distribusi dan pemasaran pangan ke seluruh daerah
10. Meningkatnya kemampuan nasional dalam mengenali, mengantisipasi dan menangani secara dini serta dalam melakukan tanggap darurat terhadap masalah kerawanan pangan dan gizi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu secara kualitatif. Menurut Melong (2007), kualitatif adalah yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu di bagian Ketahanan daerah rawan pangan, di dinas Peretanian dan Ketahanan Pangan di Yogyakarta.

C. Jenis Data

1. Data Primer

Dalam melakukan sebuah penelitian umumnya menggunakan data-data valid dan akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer biasanya diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data ordinal, (Sugiyono, 2012). Data primer

didapatkan melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data primer untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh dari jawaban responden, yaitu karyawan diDinas pertanian dan ketahanan pangan DIY.

2. Data Sekunder

Selain data primer, didalam penelitian juga menggunakan data sekunder sebagai metode pengumpulan data. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu, literatur teori, dan website mengenai Analisis sistem pengambilan keputusan pada kebijakan ketahanan pangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara(*Interview*)

Sugiyono (2012) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang dilakukan penelitian peneliti yaitu dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Analisis sistem pengambilan keputusan pada kebijakan ketahanan pangan DIY. Wawancara dapat

dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

2. Observasi (pengamatan)

Sutrisno Hadi (2010), "Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian." Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa, observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data, dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan mengamati dengan seksama (melihat dan mendengarkan) gejala-gejala dari objek yang diteliti dan mencari data yang tidak bisa didapatkan melalui proses wawancara

3. Dokumentasi (*documentation*)

Metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari catatan atau dokumen di dalam Dinas pertanian dan ketahanan pangan di Yogyakarta. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui struktur organisasi dari perusahaan ini. Dari struktur organisasi tersebut dapat diketahui bagian-bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengetahui jumlah pegawai baik secara keseluruhan maupun pada setiap bagian organisasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdiri Dinas Pertanian dan Pangan DIY

Dinas Pertanian Daerah Istimewah Yogyakarta terletak di Jalan Gondosuli Nomor 06, Umbulhaljo, Yogyakarta. Dinas Pertanian Daerah Istimewah Yogyakarta merupakan unsur pelaksanaan pemerintah Daerah di bidang Pertanian yang dibentuk melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DIY dan Peraturan gubernur Provinsi DIY Nomor 38 Tahun 2008, tentang rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian. Menurut Peraturan Gubernur Nomor, 38 Tahun 2008 Bab II pasal 2 Dinas pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang di berikan oleh pemerintah.

Sejalan dengan semangat reformasi, pemerintah di tuntun untuk mengubah pola manajemen pemerintah kearah *good governance, clean government*, dan *social accountability*, oleh karena itu paradigma manajemen pembangunan pertanian menempatkan posisi Pemerintah selain sebagai fasilitator juga sebagai dimisator, ekselerator, regulator, dan stabilisator yang berpihak kepada petani, dengan menempatkan dan meningkatkan para petani sebagai subyek pembangunanan, Program

pembangunan pertanian di arahkan pada pemberdayaan masyarakat tani, sehingga peran birokrat difokuskan untuk mendorong investasi swasta pemberdayaan masyarakat tani agar mampu mendapatkan nilai tambah dan meningkatkan pendapatannya.

Tugas penting sektor pertanian antara lain menjamin kecukupan pangan bagi masyarakat, menyediakan bahan baku bagi industri terkait, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pertanian. Dalam situasi krisis multidimensional yang sudah berlangsung lebih dari satu dasa wasa melanda negara kita hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda perbaikan yang signifikan, terlebih lagi dengan munculnya kasus terbongkarnya korupsi tingkat tinggi yang sangat mempengaruhi fluktuasi saham dan masuknya investasi dari luar negeri. Kenaikan daya listrik setiap periodik perbulan, beberapa hal ini menyebabkan hampir semua kebutuhan sehari-hari juga mengalami kenaikan harga.

Seperti dapat dilihat pada data diakumulasi oleh BPJS bahwa sektor pertanian telah dapat menunjukkan kemampuannya dalam mempertahankan diri dari guncangan ekonomi dimana sektor pertanian menjadi katup pengaman dari berbagai kerawanan antara lain pada keadaan rawan pangan dan rawan sosial. Dengan keadaan demikian itu sektor pertanian merupakan penopang utama ketahanan pangan nasional. Jika pertimbangkan yang sanggup memberi kontribusi besar dalam ketahanan stabilisasi sosial politik nasional. Jika mempertimbangkan hal-hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan untuk pembangunan

pertanian maka kebijakan dan program pembangunan pertanian dimasa yang akan datang perlu disusun menjadi lebih efektif dan efisien agar sasaran teknis yang berupa peningkatan produksi dan pendapatan petani dapat terwujud.

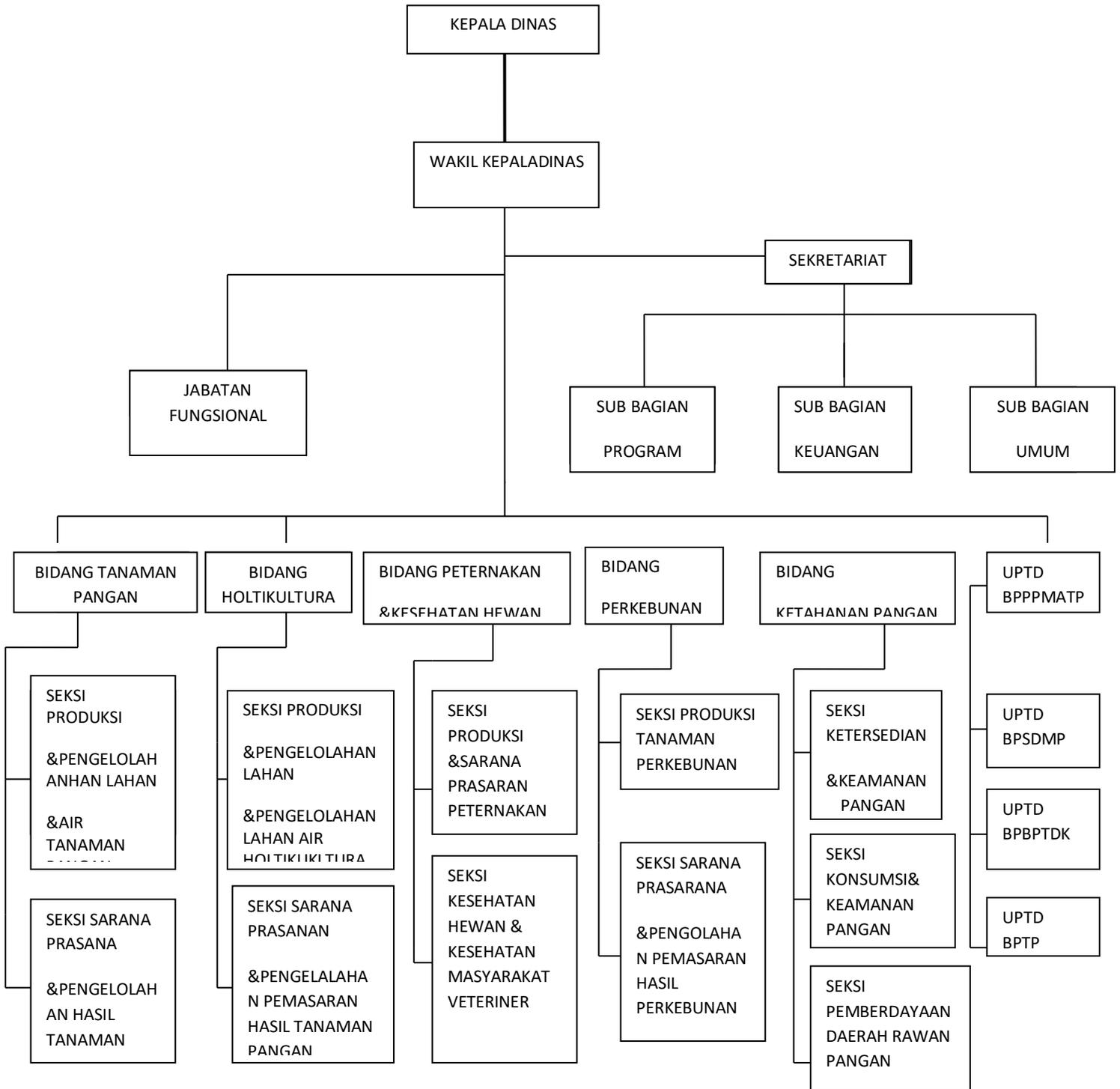
Program pemberdayaan masyarakat tani melalui pengembangan usaha kelompok baik dalam bentuk kelompok tani tanaman pangan, kelompok tani tanaman hortikultura, kelompok tani peternakan, kelompok wanita tani, maupun gapoktan pada subsektor agribisnis dan ketahanan pangan telah dan sedang difasilitasi besar-besaran oleh pemerintah. Fasilitas berwujud PBLM dan hibah yang antara lain berupa sarana produksi, permodalan, usaha produksi, usaha pengolahan hasil pemasaran, supervisi konsultasi, SLPHT, dan usaha-usaha jasa penunjang lainnya sehingga diharapkan pada kawasan pengembangan dapat tumbuh dan berkembang sistem usaha agribisnis secara terpadu, berkelanjutan agar tercapai usaha pertanian dan dari hulu hingga hilir.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah kegiatan disektor pertanian mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya pertanian antara lain :

sarana prasarana, sumber daya alam, sumber daya manusia. Semua sumber daya yang diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat petani melalui peningkatan pendapatan dan sedapat mungkin mempertahankan ketahanan pangan nasional.

2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan DIY

Berikut ini Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan DIY



3. PenjabatStruktural Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Berikut ini penjabat struktural Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
DIY Tahun 2020.

- a. Kepala dinas (Ir.Arofa Noor Indriyani, M,si.)
- b. Wakil kepala Dinas
- c. Sekretariat
 - 1) Sub bagian program
 - 2) Sub bagian Keuangan
 - 3) Sub bagian umum
- d. Jabatan fungsional
- e. Bidang tanaman Pangan
 - 1) Seksi Produksi & Pengelolaan lahan & Air Tanaman Pangan
 - 2) Seksi sarana prasarana & pengolahan pemasaran hasil tanaman pangan
- f. Bidang Holtikultura
 - 1) Seksi Produksi & pengelolaan lahan & air holtikultura
 - 2) Seksi sarana prasarana & pengolahan pemasaran hasil holtikultura
- g. Bidang Peternakan & Kesehatan Hewan
 - 1) seksi produksi & sarana Prasarana Peternakan
 - 2) seksi kesehatan hewan & kesehatan masyarakat veteriner
- h. Bidang perkebunan
 - 1) seksi produksi tanaman perkebunan

- 2) seksi sarana prasarana & dan pengolahan pemasaran hasil perkebunan

i. Bidang Ketahanan Pangan

- 1). seksi ketersediaan & distribusi pangan
- 2). seksi konsumsi & Keamanan Pangan
- 3). seksi pemberdayaan daerah rawan pangan

j. UPTD BPPPMTP

- 1). uptd bpsdmp
- 2). uptd bpbptdk
- 3). uptd bptp

4. Tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 44 Tahun 2008 Tentang tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

a. Tugas.

Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan urusan Pemerintahan Bidang Pangan.

b. Fungsi.

- 1). Penyusunan Program kerja Dinas

- 2). Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, dan kesehatan Hewan serta ketahanan Pangan.
- 3). Pelaksanaan fasilitas dan pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, serta Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 4). Pelaksanaan fasilitas dan Pengembangan Ketahanan Pangan.
- 5). Pelaksanaan Pengembangan pascapanen, pengolahan, mutu dan pemasaran hasil tanaman Pangan, holtikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan.
- 6). Fasilitas pembiayaan usaha Tanaman Pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan.
- 7). Pemberian fasilitas penyelenggaraan Bidang Tanaman Pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan Kabupaten/ Kota.
- 8). Penyelenggaraan Kegiatan bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan lintas Kabupaten/ Kota.
- 9). Pelestarian tradisi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan.

- 10). Pengembangan Kemitraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan.
- 11). Fasilitas, pelayanan, sertifikasi, komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan.
- 12). Fasilitas sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan,serta ketahanan pangan.
- 13). Penyelenggaran pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- 14). penyelenggaran perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tumbuhan.
- 15). penyelenggaraan pengujian mutu dan keamanan pangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- 16). Penyelenggaraan produksi benih sumber tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- 17). Penyelenggaran produksi bibit ternak dan bibit pakan ternak.
- 18). Penyelenggaraan diagnostik kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- 19). Pengembangan sumber daya manusia pertanian.

- 20). Penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan.
- 21). penyelenggaraan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan.
- 22). Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
- 23). Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.
- 24). Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 25). Pemantuan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan.
- 26). Pelaksanaan kordinasi, pemantuan, evaaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota.
- 27). pelaksanaan tugas lain yng di berikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

5. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

a. Visi

- 1). Terwujudnya peningkatan kualitas hidup- kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan sumber daya manusia jogja yang berdaya saing.
- 2). Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal(keunikan teroteri ekonomi) untuk

pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

- 3). Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atau dasar toleransi, tenggang rasa, kesaantunan, dan kebersamaan.
- 4). Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
- 5). Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. Misi

- 1). Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban rumusan misi ini mengakomodir substansi panca mulia 1 2 dan 3
- 2). Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. rumusan misi ini mengakomodir substansi panca mulia 4 dan 5.

6. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

DIY

a. Tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

- 1). Meningkatkan penerapan teknologi budidaya, panen dan pasca panen dan pengolahan komoditas pertanian/ perkebunan dan pangan.
- 2). Meningkatkan Produksi dan mutu tanaman pangan.

b. Sasaran

- 1) Meningkatkan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)
- 2) Meningkatkan populasi ternak.
- 3) Meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

c. Kebijakan.

- 1) Program peningkatan tanaman pangan.
- 2) Program peningkatan produksi hortikultura.
- 3) Program peningkatan produksi hasil peternakan.
- 4) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.

7. Sarana dan Prasarana/ fasilitas

NO	Sarana dan prasarana	Jumlah/ unit
1	Jaringan internet	8 unit

2	Ruangan rapat	7 unit
3	Kamar kecil/ toilet	21 unit

Daftar tabel 4.1 sarana dan prasarana/fasilitas

Luas bangunan dinas pertanian dan ketahanan pangan DIY

NO	Banguna	Posisi	Luas bangunan
1	A	Depan	400 m
		Blakang	100 m
2	B	Tengah	100 m
3	C	Depan	310 m
		Blakang	160 m

Daftar tabel 4.2 luuas bangunan dinas pertanian dan ketahanan pangan DIY

8. Sumber daya Perangkat Daerah.

Jumlah pegawai negeri sipil lingkup dinas pertanian dan ketahanan pangan DIY secara keseluruhan berjumlah 349 orang. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan jabatan adalah sebagai berikut.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah /orang
1	Pasca sarjana (S2)	31 orang
2	Sarjana (S1)	115 orang

3	D-III/ Sarmud	17 orang
4	SLTA Sederajat	151 orang
5	SLTP Sederajat	17 orang
6	SD	18 orang

Daftar tabel 4.3 jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

Berdasarkan golongan.

No	Golongan	Jumlah/orang
1	Golongan IV	40 orang
2	Golongan III	225 orang
3	Golongan II	71 orang
4	Golongan I	31 orang

Daftar tabel 4.4 berdasarkan golongan.

Berdasarkan jabatan

No	Jabatan struktural	Jumlah/orang
1	Pejabat eselon II	1 orang
2	Pejabat eselon III	10 orang
3	Pejabat eselon IV	30 orang

Daftar tabel 4.5 berdasarkan jabatan.

B. PEMBAHASAN

1. Program kebijakan ketahanan pangan di yaogyakarta

Pengembangan ketahanan pangan di yogyakarta pada saat ini masih bergantung pada program nasional ketahanan pangan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa program peningkatan ketahanan pangan di yogyakarta mengacu pada program ketahanan pangan nasional. Pembangunan disektor pertanian khususnya bidang ketahanan pangan sangat sulit dilaksanakan mengingat anggaran yang terbatas.

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014. Program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Program tersebut mencakup 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- a. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan;
- b. Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan;
- c. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; dan
- d. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2019 merupakan lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya, dengan program-program aksinya sebagai berikut :

- a. Program aksi pada kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, diarahkan pada Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang meliputi:
 - 1). Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Promosi;
 - 2). Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal; serta
 - 3). Promosi dan Sosialisasi PPKP.

- b. Program aksi pada kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, yaitu :
 - 1). Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
dan
 - 2). Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

- c. Program aksi pada kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan yaitu : Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan, Pengembangan Desa Mandiri Pangan, dan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

Program ketahanan pangan nasional inilah kemudian menjadi acuan program ketahanan pangan di Yogyakarta dengan tidak merubah format program ketahanan pangan nasional. Berdasarkan program ketahanan

pangan nasional maka diperlukan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Yogyakarta terkait ketahanan pangan. Program ketahanan pangan di Yogyakarta terdiri atas tiga program yang meliputi ;

- 1). Program aksi pada kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar,
- 2). Program aksi pada kegiatan pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan,
- 3). Program aksi pada kegiatan pengembangan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan.

Secara garis besar tiga program inilah yang telah dirumuskan oleh pemerintah Yogyakarta sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan. Adapaun program ketahanan pangan beserta rincian anggaran APBN 2019 yang dilaksanakan di Yogyakarta terdiri dari :

2. Ketahanan pangan dan prumusan kebijakan.
 - a. Pengembangan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan.

Kegiatan Desa Mandiri Pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, untuk dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga. Apabila pelaksanaan ini dilaksanakan secara meluas, maka kegiatan Desa Mandiri Pangan akan berdampak terhadap penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di pedesaan.

Desa Mandiri Pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Kawasan Mandiri Pangan adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari kampung-kampung terpilih, untuk menegakkan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi Desa mandiri.

Kegiatan Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yaitu :

1). Penanggulangan kemiskinan

Adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat; dan

2). Program penanggulangan kemiskinan

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan yaitu terdiri dari :

- 1). Pemberdayaan masyarakat miskin,
- 2). Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa,
- 3). Pengembangan sistem ketahanan pangan, dan
- 4).Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan.

Adapun program Desa Mandiri Pangan yang dilaksanakan di kecamatan yang diwakili oleh satu desa di Yogyakarta .

Pemerintah Yogyakarta khususnya Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Yogyakarta mengharapkan dengan adanya program DEMAPAN ini dapat meningkatkan potensi pertanian di Kabupaten Yogyakarta Hal ini sesuai dengan program unggulan 2011 - 2015 pemerintah Kabupaten Yogyakarta dalam bidang pertanian dan perikanan serta sejalan dengan agenda pembangunan III yaitu mewujudkan pertumbuhan dan struktur ekonomi yang kokoh dan dinamis.

Program Pengembangan dan Pendampingan desa mandiri pangan di Yogyakarta sasaran utamanya adalah Rumah Tangga Miskin (RTS) di desa rawan pangan, sehingga dengan adanya program ini Kabupaten Yogyakarta khususnya daerah yang dipilih sebagai pusat dari program Pengembangan dan Pendampingan desa mandiri pangan dapat dilihat hasilnya sebagai berikut :

- 1). Terjadi perubahan pola pikir masyarakat tentang kebutuhan pangan tiap individu
- 2). Meningkatnya keterampilan dalam budidaya tanaman pangan, serta aksesibilitas pangan pada tiap desa
- 3). Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat
- 4). Berkembangnya modal usaha pada setiap kelompok, khususnya kelompok tani yang bergerak dalam bidang tanaman pangan
- 5). Terwujud ketahanan pangan dan gizi masyarakat sehingga terbentuknya lembaga layanan kesehatan dan gizi masyarakat pedesaan.

Dalam pelaksanaan program Pengembangan dan Pendampingan desa mandiri pangan tidak serta merta berjalan sesuai yang diinginkan, hal ini dapat terjadi karena pada tiap daerah yang menjadi pusat program dari tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, antara lain :

- 1). Angka kemiskinan pada tiap desa yang menjadi pusat program Pengembangan dan Pendampingan desa mandiri pangan berbeda-beda, hal ini dapat berpengaruh pada tingkat daya beli masyarakat tiap desa.
- 2). Rendahnya kemampuan sumberdaya manusia terkait keterampilan dalam budidaya tanaman pangan, hal ini dapat menimbulkan terbatasnya akses pangan oleh masyarakat.

3). Rendahnya dukungan sarana dan prasarana khususnya sarana transportasi, hal ini dapat menimbulkan rendahnya aksesibilitas kebutuhan pangan pada tiap desa.

b. Pengembangan Lumbung Pangan Desa.

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Ketersediaan pangan tersebut dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu:

- 1). produksi dalam negeri;
- 2). pemasukan pangan; dan
- 3). cadangan pangan.

Bila terjadi kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan pangan di suatu wilayah dapat diatasi dengan melepas cadangan pangan, oleh sebab itu cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan.

Beberapa alasan yang mendasari Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat adalah :

- 1). Bank Dunia pada tahun 2008 memperingatkan bahwa cadangan pangan Indonesia berada dalam titik terendah sehingga bisa menjadi masalah serius jika tidak diatasi sejak awal mengingat cadangan pangan dunia turun hampir setengahnya;

- 2). situasi iklim di Indonesia saat ini tidak menentu dan kurang bersahabat telah menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan), sehingga menuntut manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan;
- 3). masa panen tidak merata antar waktu dan daerah mengharuskan adanya cadangan pangan; dan
- 4). banyaknya kejadian darurat memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan wilayah.

Disamping itu, cadangan pangan juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara yang disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam.

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat bertujuan untuk :

- 1). Meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
- 2). Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan;

- 3). Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

Berangkat dari program Lumbung Pangan Masyarakat maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Yogyakarta dengan sedikit modifikasi membuat program dalam bentuk pengembangan lumbung pangan desa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap pengaruh sistem pengambilan keputusan pada kebijakan ketahanan pangan di Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan ketahanan pangan di Yogyakarta pada saat ini masih mengacu pada program ketahanan pangan nasional yang terdiri pada program nasional ketahanan pangan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa program peningkatan ketahanan dari Pengembangan dan pendampingan desa mandiri pangan, Pengembangan lumbung pangan desa
2. Terdapat pengaruh antara ketahanan pangan yang terdiri dari distribusi, ketersediaan, dan konsumsi terhadap perumusan kebijakan yang terdiri dari budaya, struktur organisasi, sistem komunikasi dalam organisasi, dan gaya kepemimpinan organisasi. Terdapat hubungan tidak langsung antara ketahanan pangan dengan perumusan kebijakan, ketahanan pangan dengan indikator ketersediaan, perumusan kebijakan dengan indikator resiko. Indikator yang paling berpengaruh dalam ketahanan pangan yaitu ketersediaan yang dapat diartikan bahwa semakin besar ketersediaan pangan maka semakin berkurangnya tingkat kerawanan pangan suatu daerah sehingga ketahanan pangan semakin baik. Indikator yang paling berpengaruh dalam perumusan kebijakan yaitu pengaruh

lingkunganyang dapat diartikan yakni dalam menentukan kebijakan terkaitketahanan pangan, faktor lingkungan sekitar sangat berpengaruh antarlain budaya, struktur organisasi, sistem komunikasi dalam organisasi, dangaya kepemimpinan organisasi.

B. Saran

1. Pemerintah daerah khususnya pemerintah yogyakarta harusnya dapat merumuskan program ketahanan pangan di tingkat daerah sehingga program ketahanan pangan berdsarkan kebutuhan berbasis lokal
2. Dalam ketahanan pangan indikator ketersediaan perlu diperhatikan. Ketersediaan yang meliputi produk domestik, distribusi pangan yang dilakukan oleh daerah lain dan cadangan pangan perlu ditingkatkan. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kerawanan suatu daerah, sehingga dapat terjaga ketersediaan pangan dalam suatu daerah.
3. Faktor lingkungan berperan sangat penting dalam perumusan kebijakanketahanan pangan, yang artinya perlu dibangun hubungan yang harmonis antara budaya, struktur organisasi, sistem komunikasi dalam organisasi, dan gaya kepemimpinan organisasi, sehingga dalam perumusan kebijakan dapat didasarkan oleh kepentingan masyarakat terkait ketahanan pangan.
4. Lumbung pangan disetiap desa dan program mandiri pangan (MAPAN) harus dioptimalkan untuk mengantisipasi kerawanan pangan karena adanya gagal panen

5. Perumusan kebijakan ketahanan pangan daerah harus terintegrasi dengan badan dan dinas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Suci dan Baliwati F. Yayuk. 2011. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Konsumsi Pangan Sumber Karbohidrat di Pedesaan dan Perkotaan*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Ariningsih, Ening dan Rachman P.S. Handewi. 2008. Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Dermawan, Rizky. 2013. Pengambilan Keputusan “*Landasan Filosofis, Konsep, dan Aplikasi*”
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yogyakarta 2011. *Laporan dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Tingkat Kecamatan*
- Hardono et al. 2004. Liberalisasi Perdagangan, : *Sisi Teori Dampak Empiris, dan Perspektif Ketahanan Pangan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi.
- Husaini, Muhammad. 2012. *Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Yogyakarta*.
- Khomsan, Ali. 2012. *Ekologi Masalah Gizi, Pangan, dan Kemiskinan*.
- Lantarsih et al. 2011. *Sistem Ketahanan Pangan Nasional : Kontribusi Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Optimalisasi Distribusi Beras*. Universitas Janabadra, Yogyakarta. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Yogyakarta.
- Mun'im, Ahkmad. 2012. *Analisis Pengaruh Faktor Ketersediaan, Akses, dan Penyerapan Pangan Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Surplus Pangan : Pendekatan Partial Least Squarepath Modeling*. Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Prabowo, Rossi. 2010. *Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia*
- Sapariyah. 2007. *Path Analysis Sebagai Salah Satu Sarana Statistik Dalam Penelitian dan Pengambilan Keputusan*. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Susanti, W. Lisana. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Petani Dalam Penerapan Pertanian Padi Organik di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sudaryono. 2010. *Aplikasi Analisis Jalur (Path Analisis) Berdasarkan Penempatan Variabel*. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta

Tanziha, Ikeu dan Herdiana Eka. 2009. *Analisis Jalur Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Yogyakarta.*